

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masuknya demokratisasi di negara berkembang memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa mengemukakan pendapatnya dihadapan publik secara terbuka. Bagi Indonesia, dengan adanya demokratisasi menjadi pintu gerbang untuk dapat melepaskan diri dari rezim otoriter Soeharto yang selama ini dianggap membungkam suara rakyat. Pasca reformasi, Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana memberikan keleluasaan kepada publik untuk menyampaikan pendapatnya. Berbicara tentang demokrasi, tak bisa terlepas dari pemilihan umum yang menjadi salah satu komponen yang esensial dalam kelangsungan suatu negara demokrasi, tak terkecuali Indonesia. Hal ini karena pada negara demokrasi, pemilihan umum merupakan lambang dan alat ukur bagi keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri, dimana dalam hal ini keikutsertaan masyarakat untuk memberikan pendapatnya di pemilu merupakan implementasi dari sistem demokrasi.¹

Diadakan setiap lima tahun sekali menjadikan pemilihan umum di Indonesia sebagai ajang bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen, baik itu di tingkat nasional, lokal, hingga kabupaten/kota. Setelah itu, pemilu pun dilanjutkan untuk memilih pemimpin di tingkat eksekutif yang akan memimpin negara. Apabila menilik dari permulaannya, pemilu sejatinya hanya dilaksanakan untuk memilih perwakilan di tingkat legislatif, sedangkan di tingkat eksekutif dipilih oleh MPR. Akan tetapi, dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, di tahun 2002 tentang Pemilu Umum menjadikan berubahnya sistem pemilihan eksekutif yang mana dipilih secara langsung oleh rakyat.

Di tahap selanjutnya, selain dilakukan pada tingkat nasional, pemerintah telah memperluas kegiatan pemilu pada lingkup lokal sebagai wujud dari

¹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 461.

demokratisasi bagi setiap daerah. Dengan adanya fakta tersebut, menunjukkan terdapat pemindahan kewenangan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pada pertengahan 2005. Beralaskan pada regulasi tersebut, kepala daerah beserta wakilnya tak lagi dipilih oleh DPRD Provinsi, akan tetapi langsung oleh rakyat. Pemberlakuan atas regulasi tersebut memiliki tujuan agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi di kegiatan demokrasi serta memberikan kesempatan kepada daerah agar bisa mengontrol wilayahnya sendiri tanpa harus bergantung pada pusat.

Di Indonesia, pertama kali dilakukannya pilkada secara serentak pada tahun 2015 yang diikuti oleh beberapa daerah yang meliputi 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten (Ferri, 2015). Dengan adanya hal ini, memperlihatkan bahwasanya perkembangan demokratisasi di Indonesia sudah pada tahap yang signifikan, dimana pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dalam memberikan suaranya melalui pemilu. Dalam hal ini, Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah yang berpartisipasi dan turut meramaikan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 2015. Terdapat tiga paslon yang bertarung dalam Pilkada ini, yakni Ikhsan Modjo – Li Claudia Chandra (paslon nomor urut 1), Arsid – Elvier Ariadiannie S. Poetri (paslon nomor urut 2), dan Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie (paslon nomor urut 3). Pada kontestasi ini, paslon dengan nomor urut 3, yaitu Airin – Benyamin berhasil memenangkan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan dengan jumlah perolehan suara sebesar 59,61%.

Kemenangan atas paslon Airin - Benyamin tak terlepas dari adanya strategi yang dilakukan oleh paslon tersebut di lingkungan masyarakat. Memanfaatkan kekuatan politik, baik dari koalisi partai dan organisasi masyarakat yang memiliki basis massa yang sangat kuat, media massa yang digunakan untuk membentuk citra positif terhadap paslon, dan kekuatan birokrasi yang kuat menjadi strategi yang dilancarkan oleh pasangan ini. Selain itu, adanya relawan 4 Pilar, yang terdiri dari Jaringan Lama (Jarla), Tingat Kepemudaan, Relawan

Banten Bersatu (RBB), dan Aiqosiah (Pengajian Ibu-ibu) merupakan tim sukses yang dirawat oleh Ratu Atut, ipar Airin menjadi kekuatan bagi paslon ini. Terlebih, kepopuleran petahana menjadi kekuatan tersendiri bagi Airin – Benyamin dalam Pilkada 2015 (Zaliana, Sulastri, Sumarno, & Andriyani, 2021). Namun, kekuatan terbesar paslon Airin – Benyamin terdapat pada partai koalisi dan organisasi masyarakat yang sudah menjalar hingga ke tingkat kelurahan. Dua hal tersebut mampu menggaet pemilih hingga ke *door-to-door*.

Termasuk ke dalam salah satu wilayah urban dan kerap dimasuki oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah, komposisi antara pemilih tradisional dan pemilih rasional cenderung seimbang. Masyarakat yang tinggal di pinggiran Kota Tangerang Selatan akan condong menjadi pemilih tradisional, yang mana berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah Tangerang Selatan yang lebih maju yang condong pada pemilih rasional. Dengan adanya karakteristik tersebut, para paslon yang berkontestasi harus mampu memenangkan hati masyarakatnya dengan melakukan berbagai strategi yang sesuai dengan urgensi masyarakat setempat.

Selang lima tahun terlaksananya Pilkada Serentak, pada tahun 2020 pilkada secara serentak kembali dilakukan untuk yang kedua kalinya. Berbagai macam kampanye politik mulai dilancarkan oleh para paslon kepala daerah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat setempat sehingga dapat memenangkan kontestasi politik lima tahunan tersebut. Berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 ini memiliki keunikannya tersendiri. Tak hanya dilaksanakan di kala pandemi, pada tahun 2020 Pilkada Serentak pun dihiasi oleh berbagai hubungan kekerabatan antara paslon yang bersaing dengan elite politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, tak terkecuali sebagaimana yang terjadi di Pilkada Tangerang Selatan.

Di kenal sebagai salah satu wilayah penyokong Ibukota DKI Jakarta, Tangerang Selatan kian mengalami kemajuan dan mulai berkembang, serta berhasil menjadi panggung bagi partai politik untuk mengetahui elektabilitasnya di dalam kelangsungan politik yang lebih luas. Fakta ini pun di dukung dengan adanya pembangunan yang kian masif yang dilakukan di kawasan Tangerang

Selatan. Dengan adanya hal ini, berhasil memikat para penanam modal untuk melakukan investasi di daerah Tangerang Selatan yang berdampak pada pemberian peluang pada masyarakat sebagai upaya peningkatan perekonomian. Adanya fakta tersebut membuat Tangerang Selatan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh para elite politik di kontestasi pemilu kepala daerah.

Pada Pilkada tahun 2020, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan sebagai Walikota dan Wakil Walikota, dimana kontestasi politik ini merupakan pertarungan antara paslon nomor tiga yang berstatus *incumbent* dengan dua paslon baru. Meskipun begitu, para paslon ini mempunyai kepiawaian tersendiri dalam mencari dukungan dari para pemilih. Pertama, terdapat paslon Muhamad – Rahayu Saraswati yang diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP. Dikenal sebagai putra daerah Banten, membuat Muhamad dianggap mampu untuk menggaet para masyarakat asli Banten untuk memilihnya. Begitu pula dengan Saras yang dikenal sebagai keponakan Prabowo Subianto yang memiliki banyak pendukung di wilayah Tangerang Selatan. Jika menilik dari perolehan kursi kedua partai tersebut, Partai Gerindra dan PDIP berhasil mendapatkan masing-masing 8 kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan sehingga memberikan peluang bagi paslon satu untuk mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat.

Kedua, terdapat paslon Siti Nurazizah – Ruhamaben yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS. Siti Nur Azizah yang merupakan putri dari Wakil Presiden Indonesia, Kyai Ma'ruf Amin, memiliki kekuatan dalam menggaet suara masyarakat Nadhlatul Ulama (NU). Disandingkan dengan wakilnya, Ruhamaben, yang berasal dari PKS memiliki pengalaman menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan 2010 – 2014. Tak hanya itu, hal lain yang menjadi kekuatan bagi paslon ini adalah kesolidan dari para pemilih PKS di Tangerang Selatan yang akan memberikan pengaruh pada Pilkada 2020. Berdasarkan pada data KPU, kedua partai pengusung paslon ini memperoleh kursi sebesar 8 kursi untuk PKS dan 5 kursi untuk Partai Demokrat di DPRD Kota Tangerang Selatan.

Terakhir, paslon Benjamin Davnie – Pilar Saga yang diusung oleh Partai Golkar, yang merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota

Tangerang Selatan dengan total perolehan 10 kursi. Paslon ini memiliki kekuatan utama berupa jaringan yang menjalar ke seluruh hampir wilayah di Tangerang Selatan. Sebab, dalam kurun waktu satu dekade menjadi Wakil Walikota Tangerang Selatan bersama dengan Airin Rachmi Diany, menghasilkan dampak positif bagi Benyamin, dimana dalam hal ini jaringan politik Benyamin sudah meluas hingga ke tahap RT dan RW. Sementara itu, dengan menyandang status sebagai keponakan dari Ratu Atut dan Airin menjadikan masyarakat mulai mengetahui sosok Pilar Saga pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. Pada kontestasi ini, Benyamin dan Pilar hadir sebagai *incumbent* yang melawan dua pasangan calon lainnya pada Pilkada Tangerang Selatan 2020.

Dibalik beredarnya berbagai isu politik yang timbul pada Pilkada Tangerang Selatan, setiap pasangan calon yang bersaing melakukan kampanye dengan menggunakan beragam metode, baik secara langsung ataupun *online* untuk menyakinkan masyarakat atas mereka. Kampanye dilakukan secara masif oleh tiap paslon dengan cara memberikan sosialisasi mengenai visi dan misi serta program yang diusung sebagai upaya mendapatkan dukungan di saat hari pemilihan. Tak hanya itu, kampanye yang dilangsungkan pun memiliki tujuan untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan kegiatan politik di Kota Tangerang Selatan, yang mana dalam hal ini dengan menggunakan hak suaranya di dalam Pilkada Tangerang Selatan 2020. Selain itu, dalam keberlangsungan kampanye Pilkada Tangsel 2020, media massa hadir sebagai penyalur utama informasi. Ini dikarenakan kemajuan teknologi mengakibatkan adanya perubahan dari kekuatan media dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang diambil oleh masyarakat dalam menghadapi suatu situasi politik.²

Paslon nomor urut tiga, yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga sukses unggul pada pemilihan dengan perolehan suara sebanyak 40,9% yang mana mengalahkan dua paslon lainnya, yaitu Muhamad dan Saras sebanyak 35,7% dan Azizah dan Ruhama 23,4%.³ Pada kontestasi ini, tercantum jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pemilu adalah sebesar 594.711 orang dengan

² Jan E. Leighley. 2010. *Vote Choice*. New York: Oxford University Press. Hal. 900.

³ <https://pilkada2020.kpu.go.id> <https://pilkada2020.kpu.go.id>. Diakses pada 25 Mei 2021.

total suara sah sebesar 575.725 dengan tingkat kehadiran 60,48%. Hal ini kemudian menunjukkan terdapat penambahan partisipasi masyarakat dalam pemilu, meskipun masih tidak seperti yang diharapkan KPU Tangerang Selatan. Kenaikan keterlibatan masyarakat di Pilkada Tangerang Selatan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan berbagai faktor yang kerap memengaruhi perilaku pemilih. Melihat dari data KPU Tangerang Selatan, tercatat terdapat kenaikan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 sebesar 4,33%, yang mulanya hanya 56,15% menjadi 60,48% di tahun 2020. Jika menilik dari Pilkada Tangerang Selatan pada tahun 2015, adanya ketertarikan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilu kepala daerah dikarenakan alasan kualitas dari para figur yang berkontestasi sehingga hal ini pun kerap menjadi salah satu pedoman bagi pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya di Pilkada tahun 2020.

Berdasarkan pada beberapa pendekatan perilaku memilih, terdapat sejumlah asumsi yang menjadi dasar perilaku memilih masyarakat Tangerang Selatan. Pada Columbia Model yang dibangun oleh sarjana Columbia yang menjelaskan terkait pengaruh sosiologis antara pemilih dan calon, hal ini sejatinya masih menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat, akan tetapi ketika Pilkada 2015, faktor ini kian mengalami penurunan hingga di Pilkada 2020. Kemudian, terdapat pendekatan psikologis yang ditemukan oleh sarjana Michigan atau dikenal dengan Michigan Model. Adanya dorongan psikologis memiliki kemampuan untuk membentuk kecondongan politik individu, yang mana penilaian dan kedekatan seseorang terhadap partai politik maupun calon sangat mempengaruhi pilhan politik pemilih.⁴ Di Tangerang Selatan sendiri, faktor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2020, terlebih ketika mantan Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menjadi juru kampanye dari paslon nomor urut 3 dalam Pilkada Tangsel 2020. Sementara itu, pendekatan rasional kerap menjadi alasan utama masyarakat Tangsel berpartisipasi dalam Pilkada. Adanya pelaksanaan program yang kian membaik bagi petahana maupun rancangan program dan visi misi yang menarik membuat pemilih akhirnya kembali

⁴ Ian Mc Allister, et all. 2018. *Theoretical Approaches Study of Voter Behavior*. The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion. New York: Routledge. Hal 22-24.

menggunakan hak pilihnya di TPS untuk mencoblos salah satu kandidat yang berkontestasi.

Dengan adanya hal tersebut, terbentuklah komponen-komponen yang menjadi sebab terciptanya perilaku memilih di masyarakat, yang mencakup:

Pertama, masing-masing calon yang bertarung melakukan kampanye politik untuk memperkenalkan produknya, seperti program kerja, visi dan misi, serta kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Kedua, identitas partai, dimana keberadaan partai politik menjadi poin tambahan bagi calon yang berkompetisi di kontestasi politik. Di Indonesia, tiap partai politik memiliki banyak pendukung setia di berbagai daerah yang mana ini kemudian mempermudah pemetaan pemilih yang mendukung suatu partai politik atau kandidat. Ketiga, kualitas calon dalam menghadapi berbagai isu kemasyarakatan, baik itu perilaku ataupun tindakannya yang akan menjadi perhatian masyarakat. Keempat, ketertarikan pemilih mengenai isu-isu politik, yang mana dalam hal ini pemilih beranggapan keputusan politiknya yang berupa pemberian suara kepada salah satu calon dianggap akan memberikan kontribusi dalam menciptakan suatu perubahan yang berarti.

Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2020 (Studi Deskripsi Perilaku Memilih di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren)”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari fenomena dan latar belakang di atas, berikut pertanyaan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti:

Bagaimana perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020 berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pilihan parpol di tingkat daerah pada pemilu 2019, dan alasan memilih?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan perilaku pemilih di Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020 berdasarkan karakteristik jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pilihan parpol di tingkat daerah pada pemilu 2019, dan alasan memilih di Pilkada tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait dengan persebaran pemilih di dua kecamatan di Tangerang Selatan, yakni Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020.
2. Memahami teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat dalam keberlangsungan pemilihan umum.
3. Berkontribusi dalam mengembangkan lingkup ilmu pengetahuan, terkhususnya mengenai Ilmu Politik dalam teori perilaku memilih.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi mengenai perilaku memilih masyarakat Tangerang Selatan, terkhususnya Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren dalam kelangsungan Pilkada Tangsel pada tahun 2020.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian berikutnya, serta mampu memberikan wawasan baru terhadap pembaca yang ingin menekuni ataupun berminat untuk mempelajari terkait perilaku memilih.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Perilaku Memilih

Pemilihan umum sejatinya adalah rangkaian aktivitas yang mengaitkan partisipasi masyarakat ketika pengambilan keputusan politik. Melihat dari sisi ilmu politik, keputusan tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai teori perilaku memilih atau *voting behaviour*.

Tinggi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat pada pemilu bisa ditelusuri dari penyebab yang memengaruhi perilaku pemilih secara individu. Keberadaan sebab-sebab tersebut kemudian membentuk suatu pandangan seorang pemilih yang kemudian menghasilkan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam kegiatan politik. Menurut Huntington dan Nelson, adanya pengaruh tersebut kemudian membuat perilaku memilih masyarakat dalam melakukan aktivitas pemilihan umum, seperti memberikan suara, membantu saat kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, ataupun tindakan-tindakan lainnya yang direncanakan untuk mempengaruhi keberlangsungan pemilihan umum (Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal, 2019). Keputusan tersebut pun tak lepas dari pengetahuan pemilih atas suatu objek dan juga kesadarannya sebagai seorang pemilih. Menurut Firmanzah, terdapat dua tipologi pemilih yang menjadi pertimbangan bagi pemilih dan menilai suatu partai politik atau calon tertentu. Pertama, *policy problem solving* yang di ilustrasikan sebagai pilihan rasional. Kedua, kesamaan ideologi dengan partai politik atau calon tertentu. Kedua hal tersebut menjadi gambaran dari para pemilih dalam menentukan keputusan politiknya (Firmanzah, 2008, p. 113). Berikut adalah empat jenis tipologi pemilih, yaitu:

Pertama, pemilih rasional yang merupakan perwujudan dari *problem solving policy*. Dalam hal ini, pemilih rasional menjadikan program kerja dan *track record* kontestan politik sebagai pertimbangan utama dibandingkan dengan kesamaan ideologi. Jika para kandidat ingin mendapatkan perhatian dari pemilih rasional, maka mereka harus mengutamakan isu-isu kemasyarakatan dan mampu memberikan solusi yang masuk akal. Jikalau solusi yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan tipe pemilih ini, mereka akan dengan mudah berpindah untuk memilih kontestan yang lain, yang mana menawarkan program kerja yang dianggap lebih sesuai. Kedua, pemilih kritis yang mana merupakan perpaduan orientasi antara *problem solving policy* dan kesamaan ideologi. Keberadaan ikatan ideologis antara pemilih dengan kandidat yang berkontestasi menjadi penting karena para pemilih tidak akan mudah untuk berpaling untuk memilih partai atau calon yang lainnya seperti sebagaimana yang dilakukan oleh pemilih rasional. Pemilih yang kritis akan selalu melakukan analisis terkait sistem ideologi partai

dengan kebijakan yang dibentuk. Kritikan yang diberikan pemilih ini sejatinya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan masukan oleh partai, sehingga partai dapat terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas kebijakan yang akan dibentuk. Namun, apabila kritik yang diberikan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap partai, pemilih akan frustrasi dan akan memutuskan untuk menciptakan partai baru dengan ideologi yang mirip seperti partai sebelumnya.

Ketiga, pemilih tradisional yang mengutamakan kesamaan ideologi dibandingkan dengan program kerja calon dalam mengambil keputusannya. Pemilih ini cenderung melihat pada kesamaan sosial-budaya, asal usul, paham, dan agama untuk memilih suatu partai. Jenis pemilih ini biasanya memiliki karakteristik jenjang pendidikan yang rendah serta konservatif dalam memegang nilai dan paham yang dianut. Pemilih tradisional sendiri merupakan pemilih yang dapat dimobilisasi selama berlangsungnya masa kampanye (Rohrschneider dalam Firmanzah, 2008, 137). Saat ini, pemilih tradisional kerap ditemukan, akan tetapi kini dibutuhkan imbalan untuk mendapatkan dukungannya. Keempat, pemilih skeptis yang mana tidak memiliki orientasi pada kebijakan partai maupun ideologinya. Hal ini dikarenakan adanya ikatan ideologi yang rendah pada pemilih sehingga berdampak pada keinginan untuk terlibat di partai politik. Kelompok pemilih ini didominasi oleh mereka yang memutuskan untuk golongan putih (golput). Pemilih jenis ini menganggap siapapun yang memenangkan pemilihan umum tidak akan membawa perubahan terhadap bangsa ke arah yang lebih baik sebagaimana yang telah mereka harapkan. Dengan demikian, semakin banyaknya pemilih yang tergolong pada pemilih skeptis menunjukkan bahwasanya kepercayaan terhadap institusi instansi politik di suatu negara tersebut tergolong rendah (Firmanzah, 2008, pp. 124-125).

Pada umumnya, ada tiga jenis pendekatan yang dapat menjelaskan terkait dengan perilaku memilih dalam pemilu. Pertama, Mahzab Columbia yang biasa dikenal dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dipaparkan oleh Paul F. Lazarsfeld dalam karyanya yang bertajuk *“The People’s Choice”*. Kedua, pendekatan psikologis atau mahzab Michigan yang diperkenalkan oleh Angus Campbell dalam karyanya yang berjudul *“The Voter Decides”*. Ketiga,

pendekatan pilihan rasional (*rational-choice*) yang diperkenalkan melalui buku “*An Economic Theory of Democracy*” oleh Anthony Downs. Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan rasional. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pendekatan:

a. Pendekatan Sosiologis

Faktor ini menitikberatkan bahwa ciri khas sosiologis seorang kandidat akan memengaruhi perilaku memilih individu. Pada pendekatan ini, ciri khas pemilih, yaitu agama yang dianut, etnisitas, dan kelas sosial merupakan faktor terpenting dalam memutuskan pilihan politik individu (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019, p. 91). Keberadaan dari karakteristik sosial ini nyatanya memang masih menjadi pengaruh terbesar dalam dunia politik di Indonesia. Jika melihat hubungan antara agama dan pemilu, (Greetz dalam Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019) menunjukkan bahwasanya ketika ada pemberian dukungan kepada partai politik di Indonesia, terkhususnya di Jawa yang berkaitan dengan kelompok aliran dibedakan menjadi tiga, yakni abangan, priyayi, dan santri. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpartisipasinya seseorang ke dalam jaringan sosial, terkhususnya jejaring keagamaan akan mempermudah adanya mobilisasi politik yang dikarenakan berlimpahnya informasi yang didapatkan ketika seseorang menjalin komunikasi dengan anggota jejaring yang lain.

Tak hanya agama, etnisitas kerap menjadi faktor krusial yang mempengaruhi pilihan politik seseorang. Hal ini terkait langsung dengan sentimen kedaerahan yang melekat pada kandidat dan juga partai politik tertentu dalam perjuangannya di suatu wilayah, misalnya terkait dengan pembangunan dan kemiskinan. Terakhir, di lingkup kelas sosial, perilaku memilih dibentuk karena partai politik yang sejalan dengan kepentingan masyarakat kecil. Misalnya, keberpihakan PKI terhadap wong cilik menjadikan para buruh memberikan dukungannya kepada PKI. Dalam hal ini, kelas sosial direduksi cakupannya berdasarkan pada indikator sosial-ekonomi, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019, p. 126). Terlepas dari

faktor sosiologis lainnya, faktor agama menjadi aspek paling kuat pengaruhnya terhadap keputusan pemilih.

b. Pendekatan Rasional (*rational-choice*)

Terakhir, faktor pilihan rasional yang mana pada faktor ini, tiap individu memutuskan pilihannya atas suatu partai politik atau kandidat tertentu dengan berlandaskan pada menerima banyak keuntungan dengan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2019, p. 182). Diadaptasi dari ilmu ekonomi, pendekatan ini menjelaskan bahwa seseorang akan berbuat secara rasional dengan menitikberatkan pada pengeluaran yang minim untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, memperlihatkan bahwa perilaku memilih seseorang tidaklah permanen, melainkan berubah sesuai dengan situasi yang berlangsung, baik itu dari segi calon maupun isu-isu yang dibawa oleh calon. Partai politik dan politisi sejatinya memiliki tujuan untuk mencari kekuasaan. Dengan adanya hal tersebut, mereka berusaha mencari banyak dukungan dari masyarakat agar dapat menduduki jabatan di pemerintahan. Partai politik penguasa akan berusaha untuk mengambil hati pemilih agar bisa terpilih kembali, sedangkan partai oposisi memiliki tujuan untuk meningkatkan dukungan pemilih agar bisa mengganti pemerintah yang ada (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015). Apabila partai politik atau kandidat tertentu dapat memberikan keuntungan kepada seseorang, maka partai politik atau kandidat tersebut akan dipilih oleh pemilih. Mujani, Liddle, & Ambardi melihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengambil keputusan politik secara rasional dalam memutuskan pilihan politiknya. Hal ini terlihat dalam pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, dimana aspek ekonomi menjadi dasar dalam memilih partai politik atau kandidat tertentu.

Situasi ekonomi-politik merupakan akar dari pendekatan pilihan rasional sehingga pilihan politik individu tercipta atas penilaian kondisi ekonomi individu atau kelompok. Ini merupakan *reward* bagi pemimpin *incumbent* ketika publik memberikan evaluasi dan penilaian positif atas kinerja pemerintah. Sebaliknya, jika penilaian yang didapatkan merupakan evaluasi dan penilaian negatif, maka ada hukuman yang diberikan dari masyarakat, yaitu pengalihan suara pemilih

kepada pihak oposisi. Seseorang akan memilih partai politik atau kandidat tertentu jika para peserta pemilu dapat membantu pemilih untuk meningkatkan derajat kehidupan perekonomiannya. Dalam hal ini, informasi yang akurat tidak diperlukan untuk mengetahui apakah partai politik atau kandidat tertentu dapat membantu perekonomian mereka, cukup dengan melihat kondisi perekonomian di bawah kepemimpinan partai atau pemimpin tertentu. Jika kondisi ekonomi pemilih lebih baik dari sebelumnya, pemilih cenderung memilih partai politik ataupun kandidat pemimpin yang mereka pimpin saat ini, begitu juga sebaliknya.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pemilihan Umum

Pada umumnya, pemilihan umum adalah komponen yang esensial dari perwujudan demokrasi. Pemilihan umum dinilai sebagai akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi di pemilihan pemimpin yang akan menjadi perwakilannya di ranah pemerintah. Pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, sejatinya telah membahas terkait dengan keikutsertaan masyarakat di pemilu, yang mana tercantum bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁵ Dalam hal ini, rakyat mempunyai kekuasaan negara secara penuh, yang kemudian di delegasikan kepada pemerintah. Ini mejadikan wakil yang terpilih harus berkewajiban memberikan pelayanan yang baik serta hak kepada rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat memiliki keleluasaan ketika menentukan sosok wakilnya di pemerintahan. Berlandaskan pada Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁶ Masing-masing asas tersebut mempunyai artinya tersendiri, sebagai berikut:

- a) Secara langsung, yang bermakna sebagai seorang pemilih, rakyat mempunyai hak untuk memilih calon perwakilannya secara langsung dan tak diwakili oleh orang lain.

⁵ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada 1 Juni 2021.

⁶ Ibid.

- b) Secara umum, dimana ketika seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, tanpa terkecuali, berhak memilih dalam pemilihan umum.
- c) Bebas, artinya setiap pemilih mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusan politik yang sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan maupun tekanan serta campur tangan dari pihak lain.
- d) Rahasia yang memuat pilihan dari setiap pemilih dimana dalam hal ini bersifat pribadi serta rahasia sehingga hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
- e) Jujur, yang mana ketika dilaksanakannya pemilihan umum, semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f) Terakhir, adil yang bermakna memperlakukan semua peserta pemilu dan pemilih secara setara tanpa ada perlakuan khusus ataupun sikap diskriminatif kepada peserta maupun pemilih tertentu.

1.6.2 Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada adalah salah satu wujud demokrasi di tingkat lokal. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwasanya kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Akan tetapi, sistem pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dan masuk ke dalam agenda pemilihan umum. Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Kepala Daerah adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat di daerah untuk memutuskan calon kepala daerah. Pada lingkup ini, pemimpin di tingkat provinsi adalah gubernur, di tingkat kabupaten adalah bupati, dan di tingkat kota adalah walikota. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan umum dianggap memberikan hak dasar bagi masyarakat daerah untuk menentukan keberlangsungan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, masyarakat dapat menyampaikan keinginannya kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan

mengembangkan daerah otonomnya sendiri, yang mana dalam penelitian yang dimaksud adalah Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020.

1.6.3 Kualitas Paslon

Salah satu hal penting dalam meraih dukungan dan suara masyarakat dalam pemilihan umum adalah kualitas dari para pasangan calon. Kualitas calon merupakan karakter ataupun keunikan yang menjadikan munculnya peluang bagi para calon untuk dipilih oleh masyarakat dengan memperlihatkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagai sosok pemimpin. Untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu mengayomi masyarakatnya, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi (Sergiovanni dan Corbally 1986 dalam Imawan 1998).

Pertama, *popularity* yang memperlihatkan dikenal atau tidaknya pasangan calon yang berkontestasi oleh masyarakat. Kedua, *acceptability* yang merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap suatu pasangan calon yang berkontestasi. Dengan adanya penerimaan dalam masyarakat, memperlihatkan bahwasanya tokoh tersebut telah mendapatnya citra positif dengan kemampuannya dalam membawa kepentingan-kepentingan masyarakat. Ketiga, *capability* yang memperlihatkan kemampuan intelektual dari calon yang berkontestasi. Dalam hal ini, kemampuan tersebut dapat dilihat dari bagaimana calon menyerap aspirasi rakyat yang kemudian aspirasi yang diperoleh dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan disampaikan kembali kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

1.6.4 Kampanye Politik

Kampanye politik merupakan elemen yang penting bagi partai atau calon yang berkontestasi dalam kegiatan pemilihan umum, yang mana mereka akan menawarkan berbagai program kerja, visi, dan misi yang telah dirancang untuk meyakinkan para pemilih agar memilih mereka di hari pencoblosan. Menurut Lilleker & Negrine, kampanye politik merupakan kegiatan yang diberikan panitia pemilu dalam waktu tertentu kepada para peserta, baik partai politik ataupun calon dalam menjelaskan program kerja serta memengaruhi opini publik dan melakukan

mobilisasi terhadap masyarakat agar mendukung dan memilih mereka ketika hari pencoblosan (Firmanzah, 2008). Sementara itu, (Norris 2000 dalam Firmanzah 2008) mengartikan kampanye politik sebagai suatu teknik komunikasi politik yang dilakukan oleh calon ataupun partai politik untuk menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi terhadap program kerja dan ideologi yang mereka tawarkan. Dengan demikian, kampanye politik dapat dilihat sebagai kegiatan dalam mengumpulkan massa, orasi politik, parade, hingga pemasangan atribut partai maupun iklan yang bernuasa dan bermuatan politik.

Kemudian, dalam bukunya, Firmanzah melakukan redefinisi terkait dengan pengertian dari kampanye politik. Dalam hal ini, sebelumnya dilakukan pembedaan atas dua jenis kampanye; Pertama, kampanye menjelang pemilu (*short-term*) yang dilakukan menjelang pemilu, yang mana bertujuan untuk mengingatkan, mengarahkan, serta membentuk opini publik dalam waktu yang cenderung singkat. Kedua, kampanye permanen atau jangka panjang yang mana akan berdampak pada memori pemilih terhadap keberlangsungan partai di masa yang akan datang. Kampanye ini dilakukan secara berkelanjutan, meskipun masa pemilu sudah berakhir. Dengan adanya hal ini, masyarakat akan menilai bahwasanya partai politik selalu hadir dalam kehidupan masyarakat sehingga ini akan berdampak pada terbentuknya citra positif atas suatu partai dan tertanam di dalam ingatan publik. Sejatinya, kampanye pemilu dan kampanye politik saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dimana kampanye pemilu merupakan bagian kecil dari kampanye politik. Adanya tindakan yang dilakukan oleh partai politik atau calon, meskipun itu tidak dalam masa kampanye pemilu, ucapan dan tindakan yang dilakukannya tetap dianggap sebagai suatu kampanye politik (Firmanzah, 2008: 277).

Terjadinya pendefinisian ulang yang dilakukan oleh Firmanzah sesungguhnya dilatar belakangi oleh adanya pandangan terkait definisi kampanye politik yang tidak tepat dan telah tertanam di masyarakat. Ini kemudian dapat diperhatikan pada partai politik atau calon yang berkompetisi dalam kegiatan pemilu yang hanya fokus pada kampanye jangka pendek dan menghiraukan rekam jejak para calon yang justru menjadi pertimbangan besar bagi pemilih dalam

menentukan pilihannya. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Gelman dan King dalam Fimanzah (2008: 278) yang memperlihatkan keberadaan preferensi pemilih terhadap calon tertentu telah terbentuk jauh sebelum dilakukannya kampanye pemilu. Preferensi tersebut tidak bisa terbentuk hanya dengan dilakukannya kampanye dengan waktu singkat. Dalam hal ini, adanya kesan-kesan serta kekecewaan di masa lalu menjadikan pemilih lebih fokus terhadap konsistensi citra politik yang telah dibangun oleh partai politik atau calon dibandingkan dengan banyaknya janji-janji yang diungkapkan saat kampanye pemilu berlangsung. Adanya penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan pemilih terhadap calon yang berkontestasi tidaklah berdasarkan pada kampanye pemilu saja, tetapi juga rekam jejak dari masing-masing calon.

1.6.5 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah aktivitas yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut serta di pemilu pemimpin dan pengambilan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupannya. Ditinjau dari golongannya, partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif didefinisikan sebagai mereka yang memberikan penilaian dan usulan kepada pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan, berpartisipasi dalam usulan kebijakan dan alternatif kebijakan, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala pemerintahan. Sedangkan, masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai partisipasi pasif jika hanya menerima dan melaksanakan semua kebijakan dan keputusan pemerintah.

Pada agenda pemilu, partisipasi tidak sebatas membahas terkait pemberian suara dari pemilih ke calon, tetapi juga hal yang termasuk di dalamnya. Sebagai contoh, tatkala memasuki masa pemilu, terdapat berbagai kegiatan politik yang dilakukan oleh para pasangan calon, seperti kampanye yang bertujuan untuk menggaet dukungan dari masyarakat, ikut serta menjadi panitia di tiap pos pemungutan suara, serta kegiatan lain yang menunjang kelangsungan serta hasil akhir dari pemilu itu sendiri. Oleh karenanya, pemilu sebenarnya adalah bentuk

partisipasi politik kolektif dalam skala besar dan merupakan karakter dari kegiatan partisipasi politik lainnya. Bagi negara demokrasi, pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memengaruhi peraturan yang dibentuk oleh pemerintah serta sistem politik pemerintah yang sedang berlaku di negara tersebut.

1.6.6 Perilaku Memilih

Perilaku adalah sifat alamiah yang dimiliki oleh seorang manusia, yang merupakan ciri khas seorang individu sehingga dapat dibedakan dari individu lainnya. Dari kacamata politik, perilaku adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dibagi menjadi instansi pemerintah dan kelompok atau individu pada proses merumuskan, implementasi, dan menegakkan keputusan politik (Surbakti, 2010, p. 20). Sementara itu, memilih adalah perbuatan penentuan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang diukur sesuai dengan hati nuraninya, baik bersifat eksklusif atau inklusif. Pada bagian ini, keputusan yang akan diambil dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Perilaku memilih dimaknai sebagai sikap atau keterlibatan masyarakat di pemilihan umum. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak dalam pengambilan keputusan politiknya, terlepas dari apakah mereka memilih dalam pemilihan umum atau tidak (Surbakti, 2010, p. 185). Ketika seorang pemilih sudah menetapkan untuk memilih, sejatinya ia telah ikut serta dalam penggunaan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia dalam pemilu. Keikutsertaan masyarakat di pemilu adalah wujud dari partisipasi politik yang mana sebagai warga negara dengan sukarela terlibat untuk memengaruhi putusan publik.

1.7 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat variabel independen atau bebas, yakni karakteristik pemilih dan variabel dependen atau terikat, yaitu perilaku memilih pada Pilkada tahun 2020 di Tangerang Selatan. Dalam hal ini, variabel yang

digunakan pada penelitian ini akan di ilustrasikan sebagai hasil penelitian. Untuk mendapatkan gambaran dari perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren, penulis akan membedahnya melalui karakteristik yang telah dipilih oleh penulis.

1.8 Metode Penelitian dan Fokus Penelitian

1.8.1 Fokus Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memfokuskan pada perilaku memilih masyarakat di Tangerang Selatan di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren dengan melihat pada karakteristik pemilih dalam Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020.

1.8.2 Tipe Penelitian

Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat di Tangerang Selatan. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang bersandarkan pada filosofi positivism, dimana dalam melakukan penelitian, populasi atau sampel tertentu diperlukan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian yang kemudian dianalisis secara statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013, p. 8).

Berdasarkan pada Ali Sahab (2018), penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan tentang fenomena atau kumpulan sikap, opini, maupun perilaku yang diobservasi pada waktu dan wilayah tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat perilaku memilih dari masyarakat di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren dalam Pilkada Tangerang Selatan berdasarkan pada tiap karakteristik yang telah ditentukan oleh penulis. Penelitian ini pun berangkat dari teori perilaku memilih sehingga penulis ingin melihat bagaimana teori tersebut jika dilihat dari lingkup yang lebih khusus, yakni masyarakat di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren. Dalam mengetahui persebarannya, penulis menggunakan instrumen statistik untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat di dua kecamatan di Tangerang Selatan.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah Kota Tangerang Selatan dengan menjadikan wilayah Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren sebagai lokasi untuk mencari sampel penelitian. Kedua wilayah tersebut diambil oleh peneliti sebagai lokasi penelitian dikarenakan kawasan tersebut telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, baik dari aspek ekonomi, informasi, dan kondisi dari penduduknya. Tak hanya itu, dengan besaran jumlah DPT dari tiap daerah sebesar 231.382 untuk Kecamatan Pamulang dan 207.813 untuk Kecamatan Pondok Aren dari total keseluruhan DPT yang ada di Tangerang Selatan, yaitu sebesar 976.019, Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren merupakan daerah dengan urutan pertama dan kedua terbesar dari total seluruh kecamatan yang ada di Tangerang Selatan.⁷ Selain itu, kedua wilayah tersebut masing-masing memiliki jumlah pengguna hak suara terbesar nomor satu dan dua di Tangerang Selatan, yakni sebanyak 139.584 pemilih di Kecamatan Pamulang dan 123.852 pemilih di Kecamatan Pondok Aren.

1.8.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan atau unit gejala yang ingin diketahui oleh peneliti (Priyono, 2016, p. 104). Populasi ini terdiri dari subjek atau objek dengan ciri dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, populasi yang akan menjadi sumber data telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini, masyarakat Tangerang Selatan yang akan menjadi sumber data bagi penelitian ini adalah masyarakat yang berada pada Daftar Pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren, serta memakai hak pilihnya di Pilkada Tangsel 2020. Di Kecamatan Pamulang, masyarakat yang terdapat di DPT sebanyak 231.382, dengan penggunaan hak pilih sebanyak 139.584. Sementara itu, di Kecamatan Pondok Aren, masyarakat yang terdaftar di DPT sebanyak 207.813 orang dengan penggunaan hak pilih sebanyak 123.852.

⁷ <https://kota-tangerangselatan.kpu.go.id/2020/11/04/pengumuman-daftar-pemilih-tetap-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-tangerang-selatan-tahun-2020/> diakses pada 13 Juni 2021.

Tabel 1. 1 Jumlah pemilih yang terdaftar di DPT dan pengguna hak pilih dalam pada Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih
1	Ciputat	150.186	92.458
2	Ciputat Timur	123.726	69.749
3	Pamulang	231.382	139.584
4	Pondok Aren	207.813	123.852
5	Serpong	109.337	65.565
6	Serpong Utara	93.586	53.881
7	Setu	59.989	39.826
Jumlah		976.019	584.915

Sampel adalah besaran dan karakteristik yang dipilih oleh peneliti untuk merepresentasikan suatu populasi. Dalam hal ini, penulis melakukan pengambilan sample untuk merepresentasikan perilaku memilih di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren. Sebelumnya, digunakan rumus Slovin untuk menentukan besaran sampel yang akan diambil, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : besaran sampel minimum

N : besaran populasi (439.195 = gabungan jumlah pemilih Pamulang dan Pondok Aren)

e : kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 10% atau 0,1

Berdasarkan jumlah DPT Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Pondok Aren pada Pilkada Tangerang Selatan 2020, jumlah pemilih sebanyak 439.195, sehingga penulis memperoleh besaran sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{439.195}{1 + 439.195 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{439.195}{1 + 439.195 \cdot (0,01)}$$

$$n = \frac{439.195}{4.392,95}$$

$$n = 99,977236$$

$$n = 100$$

Berdasarkan pada hasil kalkulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 100 orang yang menjadi kuota sampel yang mana mewakili populasi dari 439.195 pemilih. Berikutnya, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampling berupa *Quota Sampling*. Menurut Sugiyono, teknik ini dapat menentukan sampel dari suatu populasi berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang sudah ditetapkan hingga jumlah (kuota) yang diinginkan terpenuhi. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampling kuota karena terdapat karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel, yaitu menggunakan hak pilih pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020. Kemudian, dalam mencari sampel, penulis mengklasifikasi berdasarkan jenis kelamin sehingga di tiap wilayah responden yang ditemukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh peneliti.

Proses penghitungan sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perhitungan Sampel Penelitian

No.	Kelurahan	Jumlah Pemilih	Jumlah Responden
KECAMATAN			

PAMULANG			
1	Bambu Apus	19.688	4
2	Benda Baru	31.114	7
3	Kedaung	37.316	8
4	Pamulang Barat	40.059	9
5	Pamulang Timur	22.981	5
6	Pondok Benda	38.134	9
7	Pondok Cabe Ilir	26.352	6
8	Pondok Cabe Udik	15.738	4
KECAMATAN PONDOK AREN			
10	Jurangmangu Barat	28.027	6
11	Jurangmangu Timur	23.295	5
12	Parigi	14.272	3
13	Parigi Baru	8.622	2
14	Pondok Aren	22.591	5
15	Pondok Betung	25.769	6
16	Pondok Jaya	7.198	2
17	Pondok Kacang Barat	16.106	4
18	Pondok Kacang Timur	25.895	6
19	Pondok Karya	17.249	4
20	Pondok Pucung	18.789	4
Jumlah		439.195	100

Dari tabel di atas, penulis akan mengambil responden dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Pondok Aren. Sebagai contoh, di Kelurahan Jurangmangu Barat yang berada pada Kecamatan Pondok Aren, sebanyak 28.027 pemilih telah terdaftar di DPT. Dalam hal ini, penulis secara acak memilih 6 responden dari kelurahan tersebut untuk menjadi sampel

penelitian. Hal yang sama juga akan diterapkan di setiap kelurahan yang berada pada dua kecamatan yang akan diteliti oleh penulis.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua sumber yang menjadi bagian dari teknik pengumpulan data, yakni data primer dan data sekunder. Di langkah pertama, penulis menghimpun data sekunder sebagai pendukung dari data primer. Data sekunder ini berkisar dari literatur yang dapat ditemukan pada artikel berita, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah, hingga literatur sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi. Pada langkah selanjutnya, penulis menggunakan metode angket untuk mengumpulkan data primer. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan responden selembar kertas atau *google form* yang sudah berisi pertanyaan dengan tipe tertutup.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu elemen yang dinilai penting dari sebuah penelitian, sebab data yang sudah diperoleh oleh peneliti haruslah diolah dan diinterpretasikan guna mendapatkan suatu kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data pun dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain pengelompokan atas data yang berdasarkan pada variable dan jenis responden, tabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, penyajian data variabel yang diteliti, melakukan kalkulasi guna menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat, dan menghitung untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis dengan tabel frekuensi dan dilanjutkan dengan *crosstabulation*, untuk mengetahui karakteristik pemilihan di Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren ketika memilih pada Pilkada Tangerang Selatan dengan dibantu oleh program SPSS sebagai alat hitung statistika.